



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TAHUN 2020



Samarinda, Pebruari 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ini dapat kami selesaikan.

Laporan ini merupakan wujud pertanggung jawaban kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang telah disinergiskan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan dan diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara lebih baik.

Samarinda, Februari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



A.F.F. SEMBIRING, S.I.P
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19690526 201609 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dasar Pembentukan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No,mor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam revisi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Hasil Capaian Kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing sasaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	35%	17%	48.57%

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	60%	68.63%	114.4%

Dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis I tidak mencapai target yang ditetapkan karena adanya Pembatasan Sosial Skala Besar pada sektor transportasi yang terjadi mulai Triwulan II sehingga diberlakukannya penerapan Protokol Kesehatan sehingga pergerakan di sektor transportasi mengalami penurunan. Sedangkan untuk capaian Sasaran Strategis II dicapai sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi Tahun 2018-2023, hal tersebut perlu ada komitmen pimpinan dalam mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja untuk ke depannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Sumber Daya Manusia	4
1.5. Aspek Strategis Organisasi	11
1.6. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	14
1.7. Sarana dan Prasarana Kerja	17
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 21
2.1. Pencanaan Strategis	21
2.2. Indikator Kinerja Utama Dishub Prov Kaltim	32
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	34
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 45
3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya 2019	45
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	52
3.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran	54
3.4. Realisasi Anggaran	70
 BAB IV PENUTUP	 72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	73

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah. Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa faktor, yaitu :

- a. Kemampuan keuangan daerah
- b. Kebutuhan daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah (SDAP)
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan
- d. Jenis dan banyaknya tugas
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis
- f. Jumlah kepadatan penduduk
- g. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tugas

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2010 dan Perda No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim.

1.2 Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Sesuai dengan Pergub No. 63 Tahun 2016 Dinas Perhubungan mempunyai Tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pergub No. 63 Tahun 2016 pasal 249, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

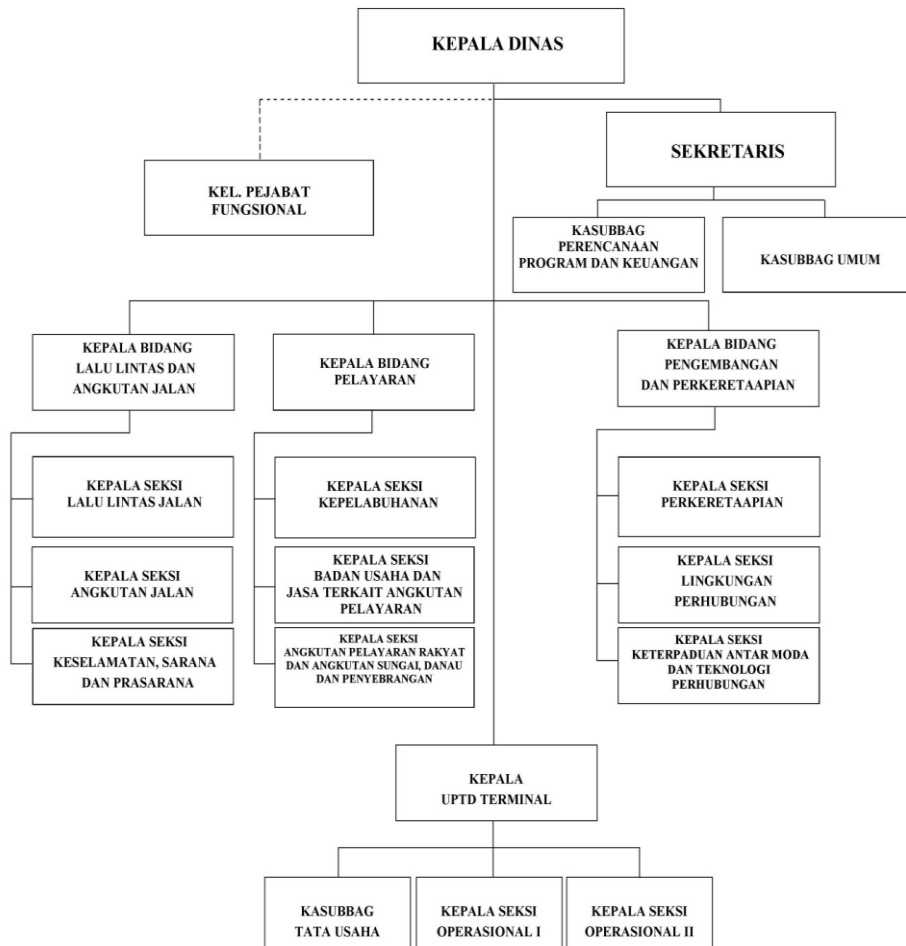
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perhubungan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pelayaran;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik.

Selain itu, dengan adanya struktur organisasi kita bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah, maupun penyampaian laporan. Dalam struktur organisasi terdapat hubungan antar komponen dan posisi yang ada di dalamnya, dan semua komponen tersebut mengalami saling ketergantungan, artinya masing-masing komponen dalam struktur organisasi akan saling mempengaruhi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada sebuah organisasi secara keseluruhan. Adapun Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun 2020



Sumber: Dishub Prov. Kaltim Tahun 2020

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1		1					1				
Sekretaris	1		1				1					
Kepala Bidang LLAJ	1		1					1				
Kepala Bidang Pelayaran	1		1				1					
Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian	1		1				1					
Kepala UPTD Terminal	1		1				1					
Kepala Subbag Umum	1			1				1				
Kepala Subbag Perencanaan Program dan Keuangan	1		1				1					
Kasi Lalu Lintas Jalan	1		1				1					
Kasi Angkutan Jalan	1		1				1					
Kasi Keselamatan, Sarana dan Prasarana	1		1				1					

Kasi Kepelabuhanan	1		1				1					
Kasi Badan Usaha dan Jasa Terkait	1			1				1				
Kasi Angkutan Pelayaran dan ASDP	1		1				1					
Kasi Perkeretaapian	1		1				1					
Kasi Lingkungan Perhubungan	1			1				1				
Kasi Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan	1		1				1					
Kasubag Tata Usaha Terminal	1		1				1					
Kasi Operasional I Terminal	1			1				1				
Kasi Operasional II Terminal	1			1				1				
Subbag Umum	5	6		7	4		1	3		6	1	
Subbag Perencanaan Program dan Keuangan	6	3		6	3			3		6		
Seksi Lalu Lintas Jalan	4			3	1			2		2		
Seksi Angkutan Jalan	2	2		3	2			2		2		
Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana	2	1		2	1			2		1		

Seksi Kepelabuhanan	2			2				1		1		
Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait	2	1		1	2			1		2		
Seksi Angkutan Pelayaran dan ASDP	2	1		2	1			2		1		
Seksi Perkeretaapian	2	1		2	1			1		2		
Seksi Lingkungan Perhubungan	2			2				1	1			
Seksi Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan	2			2				1		1		
Pengelola Terminal	32	3	2	13	19	1	1	7	-	25	1	-
Jlh PNS	78	18	14	48	33	1	13	31	1	49	2	-
Jlh Honor/PTT	62	21	-	-	-	-	-	19	4	51	5	4
Jlh PNS +Honor/PTT	139	39	14	48	33	1	13	50	5	99	7	4

Sumber : Sub Bag Umum Sekretariat Dishub Kaltim Tahun 2020

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2020 Dinas Perhubungan Prov Kaltim memiliki jumlah Sumber Daya Aparatur sebanyak 96 orang Pegawai Negeri Sipil dan 83 orang Pegawai Tidak Tetap (Outsourcing).

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		L	P
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	SLTP	2	-
3	SLTA	41	8
4	Sarjana Muda (D-III)	1	-
5	Sarjana (S1/D-IV)	22	9
6	Pasca Sarjana (S-2)	12	1
7	Doktor (S-3)	-	-
	Jumlah	78	18
	TOTAL	96	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2020

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	
		L	P
1	I/a Juru Muda	-	-
2	I/b Juru Muda Tk. I	-	-
3	I/c Juru	-	-
4	I/d Juru Tk. I	1	-
5	II/a Pengatur Muda	1	-
6	II/b Pengatur Muda Tk. I	7	-
7	II/c Pengatur	9	2
8	II/d Pengatur Tk. I	14	-
9	III/a Penata Muda	4	-
10	III/b Penata Muda Tk. I	9	8
11	III/c Penata	3	5
12	III/d Penata Tk. I	16	3

13	IV/a Pembina	9	-
14	IV/b Pembina Tk. I	4	-
15	IV/c Pembina Utama Muda	-	-
16	IV/d Pembina Utama Madya	1	-
	Jumlah	78	18
	TOTAL	96	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2020

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah	
		L	P
1	Eselon II	1	-
2	Eselon III	4	-
3	Eselon IV	14	-
	Jumlah	19	
	TOTAL	19	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2020

Tabel 1.5
Komposisi Tenaga Kontrak Tahun 2020

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		L	P
1	SD	3	1
2	SMP	5	-
3	SMA	40	11
4	D-III	2	2
5	S-1	11	8
	Jumlah	61	22
	TOTAL	83	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2020

Tabel 1.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah	
		L	P
1	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	1	-
2	Sekretaris	1	-
a	Sub Bagian Perencanaan Program	1	-
b	Sub Bagian Umum	1	-
c	Sub Bagian Keuangan	1	-
3	Kepala Bidang Perhubungan LLAJ	1	-
a	Seksi Lalu Lintas	1	-
b	Seksi Angkutan Jalan	1	-
c	Seksi Teknik Sarana Prasarana Jalan	1	-
4	Kepala Bidang Pelayaran	1	-
a	Seksi Kepelabuhan	1	-
b	Seksi Badan Usaha Dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran	1	-
c	Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat Dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan	1	-
5	Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian	1	-
a	Seksi Perkeretaapian	1	-
b	Seksi Lingkungan Perhubungan	1	-
c	Seksi Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan	1	-

6	Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	31	15
Jumlah Keseluruhan Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim		46	15

1	Kepala UPTD Terminal	1	-
a	Sub Bagian Tata Usaha	1	-
b	Seksi Operasional I	1	-
c	Seksi Operasional II	1	-
2	Pegawai UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	28	3
Jumlah Keseluruhan Pegawai UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim		32	3
TOTAL		96	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2020

1.5 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, Dinas perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan pada hakekatnya memiliki tugas dalam membantu Gubernur Kalimantan Timur untuk melaksanakan pencapaian visi misinya terutama pada bidang kebutuhan infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan sarana transportasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Prov Kaltim memiliki peran penting dalam menvapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam tujuan meningkatkan akseibilitas wilayah terutama pada aspek transportasi di Kalimantan Timur.

Dinas Perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka

mewujudkan jasa pelayanan transportasi yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. Sedangkan unsur pelaksana pemerintah di bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perhubungan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, Dinas Perhubungan, secara umum memiliki fungsi strategis dalam pembangunan Kalimantan Timur sesuai dengan tujuan strategis Provinsi Kalimantan Timur yaitu “Meningkatnya Aksesibilitas wilayah” yang ditunjang dengan arah kebijakan berupa :

1. Meningkatkan infrastruktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas ke pusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman;
2. Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat

Dimana hal tersebut diatas di implementasikan dalam program prioritas :

1. Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP
2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jalan

Selanjutnya Dinas Perhubungan Prov Kaltim melakukan identifikasi lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Teknik identifikasi menggunakan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Dalam lingkungan internal identifikasi dalam bentuk Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) yang merupakan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas. Sedangkan dari lingkungan eksternal diidentifikasi dalam bentuk Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) yang merupakan dorongan dan hambatan kinerja dengan hasil sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strengths*)
 - a. Adanya kewenangan pengelolaan sektor perhubungan di daerah;
 - b. Adanya dukungan dari berbagai stakeholders transportasi baik instansi vertikal maupun di daerah serta organisasi profesi;

- c. Adanya potensi sumber daya alam serta deregulasi perundang-undangan yang memberikan peluang kepada daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk turut berkiprah dalam dunia transportasi.
2. Kelemahan (*Weaknesses*)
- a. Cakupan wilayah kerja yang cukup luas memerlukan peningkatan pengawasan dan pengelolaan yang profesional;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas karena terbatasnya sarana dan prasarana sehingga belum tergalinya potensi pengelolaan bidang tugas seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangan global;
 - c. Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional.
3. Peluang (*Opportunities*)
- a. Adanya peluang peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur;
 - b. Terdapat minat penanaman modal di daerah yang berhubungan erat dengan dunia usaha transportasi;
 - c. Adanya kebijakan Pemerintah dalam penataan dan pengembangan wilayah.
4. Ancaman (*Threats*)
- a. Rendahnya ketertarikan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum;
 - b. Masih rendahnya kedisiplinan dan pemahaman masyarakat pelaku transportasi.

Dengan menggunakan metode SWOT faktor-faktor kunci keberhasilan yang ada dikelompokkan kedalam 4 strategi yaitu :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman/kendala
3. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Dari strategi tersebut diambil faktor-faktor kunci sebagai berikut :

1. Pemberdayaan, peningkatan Sumber Daya Manusia;
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber dana secara optimal;
3. Sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan di bidang transportasi;
4. Penegakan hukum secara konsisten (taat azas);
5. Peningkatan, koordinasi antar/inter instansi;
6. Peningkatan mutu pelayanan.

1.6 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Identifikasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi fokus dan prioritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya . Isu-isu strategi ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi yang akan mendatang. Dengan memprioritaskan penanganan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Adapun Permasalahan yang ada pada Bidang-bidang dan UPTD di Dinas Perhubungan Prov Kaltim adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Perhubungan LLAJ, antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi meliputi rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, RPPJ, lampu penerangan jalan dan lain-lain data menunjukkan angka kecelakaan cukup tinggi namun tingkat fatalitas menurun;
2. Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas;
3. Belum optimalnya pengawasan terhadap kendaraan yang over dimensi dan *over loading* (ODOL) di jalan;

4. Masih minimnya tenaga ASN sektor perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang LLAJ dan bersertifikat PPNS LLAJ;
5. Belum tersedianya Rencana Induk Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Belum optimalnya pelaksanaan program Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada ruas Jalan Provinsi (Analisa Dampak Lalu Lintas);
7. Belum optimalnya penggunaan angkutan umum;
8. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi para operator dalam pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) angkutan umum AKDP.

2. Permasalahan Bidang Pelayaran

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Pelayaran, antara lain :

1. Masih adanya pemahaman yang berbeda antara PP No. 38 Tahun 2007 dengan KM Perhubungan No. 58 Tahun 2007 terhadap penanganan kapal-kapal yang berlayar di perairan daratan
2. Belum tersusunnya Dokumen Studi Lingkungan di beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
3. Belum tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) di beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
4. Belum terciptanya pelaporan angkutan laut secara periodik dan berjenjang
5. Belum tersusunnya dokumen administrasi (izin lokasi, izin pembangunan dan izin operasional) terhadap beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
6. Perlunya rasionalisasi luasan DLKR dan DLKP untuk beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
7. Belum tersedianya database secara akurat terhadap keberadaan pelabuhan laut di Kalimantan Timur

8. Belum tersedianya database secara akurat terhadap keberadaan Pelabuhan Khusus dan atau dermaga khusus di Kalimantan Timur
9. Beberapa pelabuhan laut belum dikembangkan sesuai dengan masterplan sehingga berakibat kapasitas pelabuhan laut tidak sebanding dengan aktifitas/permintaan jasa angkutan laut
10. Pelayanan pelabuhan masih konvensional
11. Sempit dan dangkalnya alur pelayaran disebabkan pelabuhan berada di sungai
12. Masih minimnya fasilitas keselamatan pelayaran
13. Kondisi keamanan dan tertib di pelabuhan laut belum optimal karena sarana kapal patroli, kapal navigasi dan kapal pandu jumlahnya terbatas dan umurnya relatif tua
14. Belum selesainya pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy di kabupaten Kutai Timur yang merupakan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.

3. Permasalahan Pengembangan dan Perkeretaapian

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian, antara lain :

1. Belum optimalnya simpul transportasi yang terintegrasi;
2. Belum optimalnya sarana transportasi antar moda;
3. Belum tersedianya dokumen rencana induk untuk terminal type B, dan Pelabuhan/Dermaga sungai, danau dan penyeberangan;
4. Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Belum optimalnya ketersediaan dokumen kajian lingkungan untuk Terminal Type B dan Pelabuhan/dermaga SDP di Kaltim;
6. Belum tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota se Kaltim;
7. Belum optimalnya fasilitas Sistem Informasi dan Teknologi Perhubungan;

8. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen sektor perhubungan di Kalimantan Timur.

4. Permasalahan UPTD Terminal

1. Belum tersedianya Rencana Induk Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Belum tersedianya perencanaan terminal terpadu di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Belum tersedianya kajian lingkungan (UKL/UPL) Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kurangnya tenaga ASN yang memiliki kompetensi Teknis tentang pengelolaan terminal;
6. Masih minimnya tenaga ASN di Terminal Type B yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang pelayaran dan bersertifikat PPNS;
7. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Angkutan antar Terminal Tipe B di Kalimantan Timur;
8. Belum adanya Standar Pelayanan Operasional (SOP) di Terminal Type B;
9. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk kebutuhan penyediaan fasilitas dan operasional di Terminal Type B;
10. Belum adanya regulasi tentang legalitas asset Terminal Type B dari Pemerintah Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi.
11. Masih adanya lahan terminal yang dalam penguasaan masyarakat

1.7 Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor, kendaraan dinas, inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan

prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Khusus prasarana kendaraan dinas/operasional di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 1.7
Komposisi Kendaraan Dinas/Operasional R4 dan R2

No	Jenis/Merk Kendaraan	No. Polisi	Tahun Pembuatan	Kondisi
A	KENDARAAN Roda 4			
1	Pick up/Ranger	KT 8473 B	2004	Baik
2	Double Cabin/Mitsubishi	KT 8494 B	2005	Baik
3	Minibus/Toyota Kijang	KT 1273 DZ	2003	Baik
4	Minibus/Isuzu TBR	KT 2369 BZ	2003	Baik
5	Minibus/Isuzu Touring	KT 1907 B	2003	Baik
6	Minibus/Isuzu TBR	KT 2401 BZ	2003	Baik
7	Double Cabin/Mitsubishi	KT 1902 B	2003	Baik
8	Minibus/Toyota Kijang	KT 1782 B	2003	Baik
9	Minibus/Toyota Kijang	KT 2408 BZ	2003	Baik
10	Minibus/Ford Everest	KT 1369 BZ	2004	Baik
11	Minibus/toyota avanza	KT 2758 BZ	2005	Baik
12	Minibus/Isuzu MR	KT 9100 B	2005	Baik
13	Minibus/Toyota Avanza	KT 1015 BZ	2008	Baik
14	Minibus/Toyota Avanza	KT 1014 BZ	2008	Baik
15	Bus/Isuzu NHR	KT 9065 B	2005	Baik
16	Minibus/Suzuki APV	KT 1564 BZ	2010	Baik
17	Minibus/Toyota Kijang	KT 2790 BZ	2003	Baik
18	Jeep/Toyota Fortuner	KT 1716 BC	2011	Baik

19	Pick Up/Suzuki Mega Carry Extra	KT. 8879 BZ	2012	Baik
20	Hilux seri V	KT. 8486 BZ	2019	Baik
B	KENDARAAN Roda 2			
1	Sepeda motor/Yamaha 5 LM	KT 5730 B	2002	Baik
2	Sepeda Motor/Honda NF 100 D	KT 4759 M	2003	Baik
3	Sepeda Motor/Honda NF 125 D	KT 4102 MZ	2005	Baik
4	Sepeda Motor/Honda NF 125 TD	KT 4698 MZ	2008	Baik
5	Sepeda Motor/Honda NF 125 TD	KT 4699 MZ	2008	Baik
6	Sepeda Motor/HondaGL 160 D	KT 4819 MZ	2009	Baik
7	Sepeda Motor/Honda NC11B1C	KT 4818 MZ	2009	Baik
8	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3934 B	2010	Baik
9	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3935 B	2010	Baik
10	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3932 B	2010	Baik
11	Sepeda Motor/Honda GLP III	KT 4012 MZ	2004	Baik
12	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3252 M	2011	Baik
13	Sepeda Motor/Honda NF 125 RR	KT 3245 M	2011	Baik
14	Sepeda Motor/Honda NF 100 TD	KT 4286 M	2002	Baik
15	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3429 MZ	2012	Baik
16	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3430 MZ	2012	Baik
17	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3431 MZ	2012	Baik
18	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3432 MZ	2012	Baik
19	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5975 B	2020	Baik
20	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 6966 B	2020	Baik
21	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5979 B	2020	Baik
22	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5077 B	2020	Baik
23	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5700 B	2020	Baik
24	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5600 B	2020	Baik

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2020

Dari Tabel diatas dapat diketahui jumlah kendaraan operasional yang terdapat di Dinas Perhubungan Prov Kaltim berjumlah 20 kendaran roda empat dan 24 kendaraan roda dua kendaraan dan dalam keadaan baik.

Tabel. 1.8
Luas Bangunan dan Sarana Prasarana Penunjang
Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2020

No	Uraian	Luas Bangunan (M ²)	Jumlah	Luas Keseluruhan (M ²)
1	Bangunan Induk	2,950	2	5,900
2	gedung koperasi	180	1	180
3	gedung Dharma Wanita	419	1	419
4	Musholla	157	1	157
5	Kantin	32	1	32
6	bangunan baru	202	2	404
7	Ruang Rapat		2 Unit	
8	Area Parkir		2 Ruang	
9	Komputer		75 unit	
10	Telepon		2 Unit	
11	Webbsite		1 Buah	
12	Papan Pengumuman		1 Unit	
13	Videotron		1 Unit	
	Luas Bangunan Keseluruhan			7.092 M ²

Sumber: Subbag Umum Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa luas keseluruhan pada kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim adalah seluas 7.092 M².

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Penetapan Visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga dapat diartikan sebagai gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah tersebut. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sektor perhubungan Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun ke depan.

1. VISI

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mempengaruhi arah kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2023 adalah :

“BERANI UNTUK KALTIM YANG BERDAULAT”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

- 1) Berdaulat Salam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas
- 2) Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan
- 3) Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan
- 4) Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
- 5) Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesionalitas dan Berorientasi Pelayanan Publik

Dari Beberapa Misi diatas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab dan memiliki fokus sasaran pada misi ke-3 (tiga) yaitu **“Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan”**

3. TUJUAN

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah :

- 1) Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah

4. SASARAN

Sasaran penyelenggaraan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur akan difokuskan pada peningkatan pemerataan fasilitas pelayanan transportasi secara adil, merata dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi sehingga pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2023 dapat terpenuhi secara berkesinambungan.

Berdasarkan fokus sasaran tersebut, maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2019 - 2023, sebagai berikut :

Sasaran-1 :

- Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan Yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman

Sasaran-2 :

- Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat

5. INDIKATOR KINERJA

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, maka sasaran sektor perhubungan sesuai RPJMD yaitu, *Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah* dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Provinsi Sektor Perhubungan Tahun 2019-2023 (RPJMD)

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Perhubungan								
1	Jumlah Penumpang yang Terlayani (Orang) dan Jumlah Barang (Ton)	Penumpang (Orang) dan Barang (Ton)	10.392.536 (orang) dan 325.051.663 (Ton)	10.705.000 (Orang) dan 334.805.000 (Ton)	11.026.150 (Orang) dan 334.850.000 (Ton)	11.356.200 (Orang) dan 355.200.000 (Ton)	11.700.000 (Orang) dan 365.900.000 (Ton)	12.050.000 (Orang) dan 376.900.000 (Ton)	12.050.000 (Orang) dan 376.900.000 (Ton)

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2019 - 2023

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Target Capaian Lima Tahunan yang mendukung Visi dan Misi serta RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Indikator
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

VISI : Berani Untuk Kaltim Yang Berdaulat MISI : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan											
N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET KINERJA INDIKATOR					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Aksesibilitas	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	25	30%	35%	40%	45%	50%	50%
2	Wilayah	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	%	50	50%	60%	70%	80%	85%	85%

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

Tabel 2.3
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dan Indikator Program
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

VISI : Berani Untuk Kaltim Yang Berdaulat MISI : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan												
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan Kapasitas Prasarana Perhubungan Laut dan SDP	83%	83%	85%	88%	90%	90.42%	90.42%
				Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Simpul Transportasi Yang Terintegrasi dan Terpadu	0 Simpul	1 Simpul	2 Simpul	3 Simpul	1 Simpul	0 Simpul	7 Simpul
				Program Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B	Jumlah Penumpang Terminal Yang Terlayani	500.000 Orang	650.000 Orang	700.000 Orang	750.000 Orang	800.000 Orang	1000.000 Orang	1.000.000 Orang

2	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	854	683	598	512	427	342	342
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja Perangkat Daerah memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
				Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki estándar kompetensi (%)	20%	25%	30%	35%	40%	50%	50%
				Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67	70.5	71	71.5	72.5	73.5	73.5

Sumber : Renstra Dishub Kaltim 2019-2023

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Program Dan kegiatan
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN				
								2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan Kapasitas Prasarana Perhubungan Laut dan SDP	Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan	Jumlah dan progres pelabuhan/ dermaga yang dibangun	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit
						Pembinaan Penyelenggaraan SDP dan Pelayaran Rakyat	Persentase sarana dan prasarana angkutan perairan memenuhi standar kelaikan berlayar	80%	81.50%	85%	91%	95%
						Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran	Jumlah badan usaha angkutan pelayaran yang dibina	100	100	100	100	100
				Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Simpul Transportasi Yang Terintegrasi dan Terpadu	Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian	Jumlah lintasan/trase kereta api yang direncanakan	1 Simpul	2 Simpul	3 Simpul	1 Simpul	0 Simpul

						Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah perencanaan kebijakan pengembangan bidang perhubungan	1 Perencanaan	2 Perencanaan	2 Perencanaan	3 Perencanaan	2 Perencanaan
						Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemandu Moda	Jumlah perencanaan angkutan pepadu moda	3 Perencanaan	2 Perencanaan	2 Perencanaan	2 Perencanaan	2 Perencanaan
				Program Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B	Jumlah Penumpang Terminal Yang Terlayani	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah I	Jumlah Terminal Tipe B Wilayah I yang dibangun/ditingkatkan	2 Terminal	1 Terminal	1 Terminal	1 Terminal	0 Terminal
						Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah II	Jumlah Terminal Tipe B Wilayah II yang dibangun/ditingkatkan	1	1	2	1	1
2	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi darat	Pertumbuhan Kelaikan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)	Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan	Panjang jalan yang dipasang fasilitas keselamatan jalan	120 Km	120 Km	120 Km	120 Km	120 Km
						Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan	Jumlah badan usaha angkutan umum yang dibina	24 Badan Usaha	24 Badan Usaha	24 Badan Usaha	24 Badan Usaha	24 Badan Usaha

						Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan	Persentase sarana angkutan darat yang laik uji dan prasarana yang laik fungsi	42.50%	50%	55%	65%	72.50%
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Kinerja Tepat Waktu	Persentase Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Kelengkapan dan Perlengkapan Kantor yang laik	80%	85%	90%	95%	100%
						Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase Pemeliharaan Gedung, Peralatan & Perlengkapan Kantor (%)	80%	85%	90%	95%	100%
				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Yang memiliki estandar kompetensi (%)	Kordinasi dan Konsultasi Lembaga	Jumlaha Kegiatan Publikasi, Tersedianya Makan dan Minum Terkait Pelaksanaan Pekerjaan dan Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi	100%	100%	100%	100%	100%

						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25%	30%	35%	40%	50%
				Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Kinerja Perangkat Daerah PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Terselenggaranya pertanggungjawaban pengadministrasian anggaran	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok
						Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok

Sumber Renstra Dishub 2019-2023

2. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Prov Kaltim

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun 2019-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUN G JAWAB
1	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	1	%	Mengukur Prosentase Pergerakan Angkutan Darat, Laut dan Udara yang beroperasi di Kalimantan Timur	$F(x) = \frac{\Delta[\sum \text{Sarana Perhubungan}] \text{Tahun} - (n-1)}{\sum \text{Sarana Perhubungan} \text{Tahun} (n-1)} \times 100\%$	Bidang Pelayaran	Kepala Bidang Pelayaran
						Bidang Pengembangan	Kepala Bidang Pengembangan
						UPTD Terminal	Kepala Bidang LLAJ
2	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi darat	2	%	Prosentase Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana LLJ di Kalimantan Timur	$F(x) = \frac{\Delta[\sum \text{Sarana Prasarana LLAJ}] \text{Tahun} - (n-1)}{\sum \text{Sarana Prasarana LLAJ} \text{Tahun} (n-1)} \times 100\%$	Bidang LLAJ	Kepala Bidang LLAJ

2.3 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Renstra telah ditetapkan target per tahun pencapaian kinerja hingga lima tahun ke depan dan untuk tahun 2020 telah ditetapkan penetapan kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Rencana Kinerja Tahun 2020
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	Mengukur prosentase pergerakan sarana transportasi darat, laut dan udara	35%
Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi darat	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	60%


Sumber: Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2020

2.3.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran

strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan/tahun anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja di Tahun 2020 pada Perangkat daerah Dinas Perhubungan Prov Kaltim adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan : Kesuma Bangsa No. 1 (0541) 737267, 739882 Faks (0541) 207033
S A M A R I N D A

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Hafidz Lahiya, SE, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

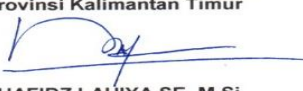
Samarinda, Januari 2020

Pihak Kedua,
Gubernur Kalimantan Timur



DR. IR. H. ISRAN NOOR, M.Si

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur



H. HAFIDZ LAHIYA, SE, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19620910 199103 1 005

Tabel 2.7
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Periode Januari 2020 Sebelum Revisi

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2		3	4	5
1	Meningkatnya Keselamatan Dalam Bertransportasi di Darat dan di Perairan Laut dan SDP	1	Ketersediaan Sarana Angkutan Perairan yang Berlayar di Perairan daratan yang Laik Layar	%	100
		2	Prosentase Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana LLAJ	%	20
		3	Peningkatan Akseibilitas Antar Moda di Bandara APT Pranoto	Orang	55.000
		4	Prosentase Kepuasan Masyarakat (%)	%	76,65
		5	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang berintegritas dan bebas korupsi	Zona	5

Sumber Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dishub 2020

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	Program		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 6.436.423.046	APBD
	Program		
	peningkatan		
2	sarana dan prasarana Aparatur	Rp 3.144.882.500	APBD
	Program		
	Peningkatan		
3	Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp 2.772.475.000	APBD
	Program		
	Penyusunan		
	Dokumen		
4	Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 1.882.285.000	APBD

Program			
Pengendalian dan			
5	Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Rp 13.501.052.020	APBD
Program			
Pembangunan			
6	Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Rp 8.733.689.554	APBD
Program			
Pengembangan			
7	Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 2.905.585.000	APBD
Program			
Pembangunan dan Peningkatan			
8	Terminal Tipe B	Rp 4.046.619.040	APBD
		<hr/> Rp 41.542.608.445	

Tabel 2.8
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PD DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Revisi April 2020

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2		3	4	5
1	Meningkatkan Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	1	Mengukur prosentase pergerakan sarana transportasi darat, laut dan udara	%	35
2	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	2	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	%	60

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Program dan Keu Dishub 2020

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 6.481.042.328
2	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Rp 2.609.490.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp 1.894.725.000
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 1.396.785.000
5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Rp 6.896.662.050
6	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Rp 685.205.000
7	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 1.257.771.600
8	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	Rp 2.359.899.665
	Jumlah Anggaran APBD	Rp 23.581.580.643

1. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Prov Kaltim melaksanakan kegiatan dengan Anggaran Murni Sebesar **Rp 57.396.346.160,-**. Melalui Mekanisme Perubahan APBD 2020, dikarenakan rasionalisasi anggaran Refocussing Penanganan Covid-19 dan Anggaran Perubahan sehingga menjadi **Rp. 38.431.915.643,-** dengan rincian Belanja Tidak Langsung **Rp. 14.850.335.000,-** dan Belanja Langsung **Rp. 23.581.580.643,-**. Adapun realisasi anggaran sebesar **Rp. 34,610,913,880,- (90.06%)** dengan rincian untuk belanja tidak langsung **Rp. 12.751.113.676,- (85.86%)** belanja langsung sebesar **Rp 21.859.800.204,- (92.69%)**.

2. Target Belanja Dinas Perhubungan

Tabel 2.9

Target Belanja Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2020		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 14.850.335.000	Rp. 12.751.113.676	85,86
2	Belanja Langsung	Rp. 23.581.580.643	Rp. 21.859.800.204	92,69
Jumlah		Rp. 38.431.915.643	Rp. 34.610.913.880	90,06

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	Rp. 2.032.976.600	8,62%	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP
				Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
				Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B
2	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Rp. 21.548.604.043	91,38 %	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dishub 2020

Tabel 2.11
Pagu Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 6.436.423.046	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 3.144.882.500	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp. 2.772.475.000	APBD
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 1.882.285.000	APBD
5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Rp. 13.501.052.020	APBD
6	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Rp. 8.733.689.554	APBD
7	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 2.905.585.000	APBD
8	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	Rp. 4.046.619.040	APBD
	Jumlah	Rp 41.542.608.445	APBD

Sumber : DPA Dishub Prov Kaltim Tahun 2020

Tabel diatas menjelaskan bahwa Pagu Anggaran Belanja langsung sebelum perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 41.542.608.445.**

Tabel 2.12
Pagu Anggaran Belanja Langsung Setelah Perubahan Tahun 2020
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 6.481.042.238	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2.609.490.000	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp. 1.894.725.000	APBD
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 1.396.785.000	APBD
5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Rp. 6.896.662.050	APBD
6	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Rp. 685.205.000	APBD
7	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 1.257.771.600	APBD
8	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	Rp. 2.359.899.665	APBD
	Jumlah	Rp 23.581.580.643	APBD

Tabel diatas menjelaskan bahwa Pagu Anggaran Belanja langsung setelah perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 23.581.580.643.**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Sebelumnya (2019)

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

Hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1
LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019	Peningkatan/Penurunan Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Kinerja	30%	23.05	23.92	+ 0.87
2	Pengukuran Kinerja	25%	16.56	18.13	+1.57
3	Pelaporan Kinerja	15%	10.70	10.34	-0.36
4	Evaluasi Kinerja	10%	4.96	5.56	+0.60
5	Capaian Kinerja	20%	11.95	14.38	+2.43
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	67.23	72.32	+5.09
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Baik	Sangat Baik	

Sumber: laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2019

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa penilaian Implementasi SAKIP pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peningkatan sebesar 5.09 dan mendapatkan Kategori BB dengan Interpretasi Sangat Baik.

2. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kaltim Terhadap Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Hasil tindak lanjut Evaluasi Inspektorat Provinsi Kaltim menyajikan rekomendasi tindak lanjut dan rencana aksi atas implementasi Sistem AKIP sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 3.2
Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Sudah/Belum
I	Perencanaan Kinerja :		
1.	Dokumen Renstra Agar selaras dengan dokumen RPJMD serta menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.	Dokumen Renstra pada Dinas Perhubungan Prov Kaltim telah dilakukan revisi dan perbaikan sesuai dengan ketentuan dan sudah selaras dengan RPJMD. (revisi April 2020) Pelaksanaan program kerja dan kegiatan mengacu pada renstra, iku dan sasaran indikator yang telah ditetapkan secara berjenjang.	Sudah; Dalam proses Revisi sejalan dengan Revisi RPJMD dimulai Minggu ke-dua Bulan Februari 2021
2.	Target Jangka menengah dalam renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan Tahun berjalan dengan mengacu pada kriteria terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara Periodik	Capaian Renstra telah dilaksanakan monitoring secara berjenjang per Triwulan untuk laporan capaian atau realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung sesuai dengan rekomendasi Kegiatan coffee morning/rapat Pejabat	Sudah; Telah dilakukan evaluasi bersamaan dengan Revisi Renstra untuk penyesuaian dengan nomenklatur Permendagri 90

		<p>Eselon III dan IV serta staf yang dilaksanakan di setiap awal pekan (hari senin) dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas sebagai indikator pembahasan evaluasi kinerja pegawai yang telah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan kedepan dengan mengacu pada renstra serta adanya dokumen rencana aksi per triwulan atas capaian, kendala dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi capaian program dan kegiatan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi covid-19</p>	
3.	<p>Dokumen Renstra agar di reviu secara berkala sehingga hasilnya menunjukan kondisi yang lebih baik atau signifikan</p>	<p>Pada Dokumen Renstra telah dilaksanakan direviu secara berkala dengan memperhatikan capaian-capaian indikator guna menunjang capaian sasaran strategis. Kordinasi secara berkala terkait penanggung jawab pemangku jabatan (Program dan Kegiatan)</p>	<p>Sudah; Reviu terhadap Renstra dilaksanakan bersamaan dengan Reviu RPJMD dengan berkoordinasi dengan Bappeda</p>
4.	<p>Rencana Aksi kinerja mencantumkan target secara periodik (pertriwulan) atas kinerja yang telah dilaksanakan</p>	<p>Dinas Perhubungan Prov Kaltim telah membuat dokumen capaian kegiatan / Program atas rencana aksi per-triwulan pada Tahun 2020 Dokumen capaian program/ Kegiatan yang menunjang capaian</p>	<p>Sudah; Telah dibuat Dokumen Capaian Kinerja Per-Triwulan</p>

		sasaran strategis secara berkala (per Triwulan)	
5.	Target Kinerja yang diperjanjikan agar dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan.	Dokumen capaian hasil realisasi Program/Kegiatan mencatumkan hasil capaiannya per program dan kegiatan secara berkala (per-triwulan) Reward dan Punishment terkait capaian program dan kegiatan sudah dilaksanakan	Belum; Dasar pelaksanaan Reward dan Punishment belum ada

II	Pengukuran Kinerja :		
1.	Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi agar dilakukan secara berkala minimal triwulan dengan syarat terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai (SOP Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi)	Dokumen capaian atas rencana aksi Dinas Perhubungan Prov Kaltim dikumpul secara berkala per triwulan kepada Biro Organisasi. Pengumpulan Dokumen atas Rencana Aksi secara berkala per triwulan	Sudah
2.	IKU Supaya sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dan IKU agar direviu secara berkala.	IKU Dishub Prov Tahun 2020 Kaltim telah direviu dan terdapat revisi dengan menyesuaikan rencana strategis yang telah ditetapkan dilakukan secara berkala atau apabila ada perubahan peraturan maupun dokumen acuan lainnya	Sudah
3.	Target Kinerja Eselon III dan IV agar dimonitor pencapaiannya dengan mengacu : 1. Terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas 2. Terdapat dokumentasi hasil monitoring 3. Terdapat tindak lanjut	Melaksanakan Pengukuran hasil capaian kinerja program dan kegiatan pada eselon IV dan III serta melakukan Monitoring Evaluasi Kegiatan per-semester dengan output dokumen 1. Dokumen hasil capaian atas rencana aksi Per	Sudah

	hasil monitoring	triwulan 2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan per semester	
4.	Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment	Hasil pengukuran kinerja berjenjang telah dimanfaatkan sebagai dasar reward dan punishment internal Dishub Prov Kaltim Evaluasi pimpinan terhadap hasil capaian kerja Eselon III dan Eselon IV	Sudah
5.	Pengukuran kinerja atas rencana aksi agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	Dokumen capaian atas rencana aksi dan dokumen monitoring evaluasi pembangunan program prioritas menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja 1. Dokumen hasil capaian atas rencana aksi Per triwulan 2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan per semester	Sudah

III	Pelaporan Kinerja :		
1.	Laporan Kinerja yang dibuat agar menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai: 1. Target vs Realisasi 2. Realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun sebelumnya 3. realisasi atau capaian	Laporan kinerja telah menyajikan Target dan capaian realisasi Dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Telah menyajikan Data target dengan capaian realisasi)	Sudah

	<p>tahun berjalan vs target jangka menengah</p> <p>4. Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJN</p> <p>5. Realisasi instansi dibanding realisasi sejenis atau setara</p>		
2.	Informasi data kinerja dalam laporan kinerja dapat diandalkan, dengan kriteria datanya valid, dapat ditelusuri kesumber datanya dll	<p>Data dan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja berasal dari pengumpulan data dari masing-masing penanggung jawab program/kegiatan yang dapat ditelusuri dan terverifikasi</p> <p>Setiap penanggung jawab program dan kegiatan akan dimintai data dan informasi setiap per triwulan untuk diketahui sejauh mana kegiatan itu berjalan</p>	Sudah
3.	Informasi yang disajikan agar digunakan dalam perbaikan perencanaan, digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	<p>Informasi yang disajikan (dokumen) telah digunakan untuk meningkatkan realisasi program dan kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim</p> <p>Dokumen Capaian realisasi berjenjang menjadi dasar acuan untuk peningkatan program dan kegiatan berjalan</p>	Sudah
4.	Informasi yang disajikan agar sepenuhnya digunakan untuk peningkatan dan penilaian	Informasi yang disajikan (dokumen) telah digunakan untuk meningkatkan penilaian	Sudah

	kinerja serta dijadikan dasar pemberian reward dan punishment	kerja sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> melaksanakan kegiatan Rapat Pimpinan secara rutin untuk membahas capaian program/kegiatan	
--	---	---	--

IV	Evaluasi Internal :		
1.	<p>Agar Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi dilakukan minimal triwulan dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terdapat informasi tentang capaian hasil rencana atau agenda 2. terdapat simpulan keberhasilan atau ketidak berhasilan rencana atau agenda 3. terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakan suatu rencana 4. terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana 	<p>Monitoring secara berjenjang dari pimpinan tertinggi sampai dengan pelaksana.</p> <p>Hasil capaian realisasi tertuang dalam doukumen capaian realisasi setiap pertriwulan</p> <p>Monitoring secara berjenjang dengan melaporkan hasil capaian kinerja sesuai targetnya untuk dilakukan pengukuran capaian.</p>	Sudah
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan rencana aksi agar dilakanakan dalam rangka mengendalikan kinerja serta memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan. 2. Hasil evaluasi rencana aksi agar dapat menunjukan perbaikan setiap periode 3. Hasil evaluasi rencana 	<p>Renacana aksi telah terpantau sehingga dapat memberikan alternatif perbaikan</p> <p>Dokumen evaluasi rencana aksi menjadi acuan dalam perbaikan peningkatan capaian program/kegiatan</p> <p>Hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.</p> <p>Memilah setiap program</p>	Sudah

	aksi harus ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.	kegiatan dengan indikator kinerja utama dimana setiap program kegiatan harus memiliki data bukti kerja seperti dokumentasi, laporan kerja bulanan sampai dengan hasil akhir capaian kerja.	
--	--	--	--

V			
Pencapaian Kinerja :			
1	Capaian Kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya	Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Prov. Kaltim pada Tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2017 Memperbaiki dan melengkapi Hasil Evaluasi Sakip Tahun sebelumnya	Sudah
2	Informasi mengenai kinerja agar dapat diandalkan	Informasi mengenai hasil dan capaian kinerja dapat diandalkan Data pendukung capaian kinerja bersumber dari masing-masing penanggung jawab program dan kegiatan dan diinput secara berkala	Sudah

Sumber : Subbag. Perencanaan program dan keuangan 2020

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa rekomendasi terhadap permasalahan yang ada telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Prov Kaltim sehingga untuk kedepannya diharapkan dapat meningkatkan hasil kinerja yang lebih baik dari Tahun sebelumnya.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Adapun target dan capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dapat diilustrasikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	Mengukur Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi Darat, Laut dan Udara	%	35%	Triwulan I	8,8% (91.671)	5,33% (55.539)	60,59
					Triwulan II	8,6% (91.670)	3,10% (33.095)	36,10
					Triwulan III	8,8% (91.671)	4,13% (43.049)	46,96
					Triwulan IV	8,8% (91.671)	4,36% (45.367)	49,49
2.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	%	60%	Triwulan I	15%	0	
					Triwulan II	15%	0	
					Triwulan III	15%	34,315%	135,9
					Triwulan IV	15%	34,315%	135,9

Sumber : Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2020

Tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi atas capaian sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 mencapai target yang telah ditentukan dalam dokumen rencana strategis 2018-2023.

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dengan Gubernur Kalimantan Timur dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksebilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman:

Indikator sasaran Strategis 1 (satu):

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Realisasi capaian :

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=5/4 \times 100$
1.	Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	35	17	48,57

Pergerakan sarana transportasi yang ada pada wilayah Kalimantan Timur Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan, baik transportasi darat, laut maupun udara hal ini dikarenakan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada sektor transportasi yang dampaknya secara signifikan mengurangi Pergerakan Sarana Transportasi dan setelah adanya peraturan/kebijakan protokol kesehatan di Transportasi Umum jumlah pergerakan sarana pun masih meningkat terbatas. Hal demikian dapat dilihat dari realisasi capaian persentase pergerakan sarana transportasi yang berkurang hampir 50% target capaian yang ditetapkan.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2019 dengan Tahun 2020 :

Dalam mengukur capaian realisasi Capaian Strategis maka diperlukan perbandingan dengan capaian sebelum-sebelumnya, sehingga dapat terlihat adanya keberhasilan atau tidak berhasilnya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, adapun realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 (satu) Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja dengan Tahun 2019 dan 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2020
			2019	2020	
1	2	3	4	5	$6 = ((5/4) - 1) * 100$
1.	Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	31.55%	17%	-46,11%

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2020

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase pergerakan sarana transportasi mengalami penurunan dari tahun 2019, yang disebabkan Pandemi COVID-19.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA/RPJMD :

Tabel 3.6
Realisasi Sasaran Strategis 1 Terhadap Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2020)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = 5/4 * 100$
1.	Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	50%	17%	33,85%

Sumber: Dinas Perhubungan Prov kaltim 2020

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis 1 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 33,85%, dimana Pada Tahun 2019 capaiannya mencapai 63,1%, hal tersebut dikarenakan adanya Pandemi COVID-19.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja :

1. Sasaran Strategis I (Indikator : Persentase Pergerakan sarana Transportasi :

• Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis 1

Transportasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat oleh karenanya kesinambungan ketersediaan pelayanan jasa transportasi dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi harus mendapat perhatian secara berkelanjutan. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur secara signifikan dapat mempengaruhi tingginya angka kebutuhan masyarakat pada sektor transportasi, karena salah satu fungsi strategis transportasi adalah menciptakan stabilitas dan kelangsungan kegiatan masyarakat serta roda pemerintahan di Kalimantan Timur, adapun jumlah pergerakan kendaraan (transportasi) Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Jumlah Pergerakan Kendaraan Tahun 2020

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Pergerakan
1	Terminal Tipe B	39.649
2	Angkutan Udara	44.070
3	Angkutan Laut	64.954
4	Angkutan Penyeberangan Kariangau dan Penajam	28.377
	Jumlah	177.050

Sumber : Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2020

Dapat diketahui pada tabel diatas bahwa jumlah pergerakan transportasi di Kalimantan Timur Tahun 2020 berjumlah 177.050 kendaraan, capaian tersebut mengalami penurunan yang signifikan baik dari Realisasi Tahun 2019 (349.221) maupun Target Renstra Tahun 2020 dengan asumsi pertumbuhan 5% (366.683) .

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan Capaian Sasaran Strategis I (Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman) adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan fasilitas Pelabuhan/Dermaga.

Potensi industri maritim di Kaltim memiliki peluang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat pada sektor perikanan, pertanian dan sektor pariwisata. Dengan potensi yang dimiliki Kaltim saat ini harus didukung dengan sistem transportasi yang handal seperti peningkatan infrastruktur transportasi laut, pembangunan dan pemeliharaan kapal pelabuhan barang, pembangunan tol laut guna penyerataan harga komoditas, menghilangkan pungli di pelabuhan, serta konektivitas sistem transportasi. Tahun 2020 upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam peningkatan infrastruktur pelabuhan, dermaga dan penyeberangan adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Pelabuhan Kariangau
- Pembinaan Badan usaha
- Pemeriksaan Keselamatan Pelayaran
- Sosialisasi dan Forum Keselamatan Pelayaran

2. Hasil Survei Indikator Kepuasan layanan Infrastruktur Transportasi dan Survei Kepuasan Masyarakat di sektor Perhubungan

Tabel 3.8
Hasil IKLI dan SKM Pada Dinas Perhubungan

No.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi				
	Tahun 2016 (IKLI)	Tahun 2017 (IKLI)	Tahun 2018 (IKLI)	Tahun 2019 (SKM)	Tahun 2020 (SKM)
1.	71.16	72	76.6	79.22	79.68

Sumber : IKLI BAPPEDA Tahun 2017 dan SKM Dishub Kaltim 2020

Hasil SKM Tahun 2020

1. Terminal Sungai Kunjang memiliki nilai : 80.06
2. Terminal Lempake memiliki nilai : 80.02
3. Terminal Bontang memiliki nilai : 79.99
4. Terminal Sangatta memiliki nilai : 79.63
5. Terminal Tenggarong memiliki nilai : 79.72
6. Terminal Paser memiliki nilai : 79.12
7. Terminal Berau memiliki nilai : 79.24

Jika secara keseluruhan dirata-ratakan maka Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Terminal Tipe B) memiliki Nilai **79.68 dengan kategori Baik**.

Dari tabel dan capaian SKM diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2017 masyarakat di Kalimantan Timur melalui tim penyusun dan penilai Indikator Kepuasan Layanan Infrastruktur Kaltim dapat diketahui bahwa pelayanan infrastruktur perhubungan dinilai sangat baik karena mencapai target kerja yaitu 72 sedangkan untuk Tahun 2019 Dinas Perhubungan Prov kaltim menggunakan Sistem Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Terminal Tipe B di Provinsi Kalimantan Timur dengan populasi masing-masing 140 orang dan sampel 103 orang responden secara acak (tabel kreji dan Morgan), dari hasil tersebut diolah data yang sehingga mendapatkan nilai 79,68% (B).

3. Pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 memaksa untuk adanya pembatasan ketat sektor transportasi sehingga sektor transportasi terkena dampak yang cukup besar pada tahun 2020, pemberlakuan Protokol Kesehatan yang ketat menjadi keharusan dalam upaya meningkatkan kembali sektor transportasi di Kalimantan Timur, walaupun sudah ada pergerakan yang cukup baik akan tetapi belum dapat meningkatkan kembali sektor transportasi ke target yang direncanakan.

- **Alternatif Solusi/ Upaya Dalam Meningkatkan Persentase Pergerakan sarana Transportasi**

1. Upaya dalam mempertahankan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima pada sektor transportasi diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (top manager), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.
2. Peningkatan kualitas atau pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan dan keselamatan pengguna sarana transportasi pada terminal, pelabuhan, dermaga, dan bandar udara (WC Umum yang terpisah antara pria dan wanita maupun penyandang disabilitas, ruang tunggu penumpang, kantin, tempat ibadah, tempat menyusui serta tempat-tempat lain

yang memiliki unsur penunjang dalam pelaksanaan pelayanan transportasi umum)

3. Melakukan pengintegrasian antar stake holder perhubungan terkait dengan monitoring pergerakan Sarana Transportasi secara berkala sebagai upaya monitoring dan evaluasi dalam untuk meningkatkan ekonomi Kaltim;
4. Pemberlakuan dan sosialisasi yang rutin tentang Protokol Kesehatan yang ketat di semua sektor transportasi.

5. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 1
(Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman)

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab	Ket
1	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP		Jumlah dan Kapasitas Prasarana Perhubungan Laut dan SDP	%	85 %	83 %	97,6 %	Kabid Pelayaran	APBD
		Pembinaan, pembangunan dan peningkatan pelabuhan	Jumlah dan Progres Pelabuhan/Dermaga/Fasilitas yang dibangun	Unit dan Dokumen	2 Unit (81,5%) dan 5 Dokumen	0 Unit dan 1 Dokumen	98,5 %	Seksi Kepelabuhanan	APBD
		Pembinaan penyelenggaraan SDP dan pelayaran rakyat	Persentase Sarana dan prasarana angkutan perairan yang memenuhi standar kelaikan	%	81,5%	80%	97,6%	Seksi SDP dan Pelayaran Rakyat	APBD
		Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran Rakyat	Jumlah badan usaha angkutan pelayaran yang dibangun	Badan Usaha	100	100	100%	Seksi Badan Usaha dan Angkutan Pelayaran	APBD

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab	Ket
2	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Jumlah Simpul Transportasi Yang Terintegrasi dan Terpadu	Simpul	2	1	50%	Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian	APBD
		Pengembangan prasarana dan fasilitas perkeretaapian	Jumlah lintasan/trase kereta api yang direncanakan	Lintasan / Kegiatan	2 lintasan/ 1 Kegiatan	0 lintasan/ 1 kegiatan	50%	Kasi Perkeretaapian	APBD
		Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah perencanaan kebijakan pengembangan bidang perhubungan	Perencanaan	2	1	50 %	Kasi Lingkungan Perhubungan	APBD
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasu Moda	Jumlah perencanaan angkutan pemuas moda	Perencanaan	2	0	0 %	Kasi Keterpaduan Antar Moda	APBD

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab	Ket
3	Program Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B		Jumlah Penumpang yang terlayani	Orang	650.000	254.928	39,2%	Ka. UPT Terminal	APBD
		Pembangunan dan peningkatan Terminal Tipe B wilayah I	Jumlah terminal Tipe B wilayah I yang dibangun/ditingkatkan	Terminal	1	0	0%	Kepala Seksi Operasional I	APBD
		Pembangunan dan peningkatan Terminal Tipe B wilayah II	Jumlah terminal Tipe B wilayah II yang dibangun/ditingkatkan	Terminal	1	0	0%	Kepala Seksi Operasional II	APBD

Sumber: Dinas Perhubungan Kaltim 2020

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk menunjang sasaran strategis 1 Dinas perhubungan memiliki 3 (tiga) Program strategis yaitu sebagai berikut :

a. Program Pembangunan Prasarana transportasi laut dan ASDP

1. Kegiatan Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan
2. Pembinaan Penyelenggaraan SDP dan Pelayaran Rakyat
3. Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran

b. Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan :

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian
2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
3. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasu Moda

c. Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B :

1. Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah I
2. Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah II

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	49,66	30,55	19,11

Sumber: Olah data 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini memiliki nilai 19,11%.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat

Indikator sasaran Strategis 2 (dua):

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Realisasi capaian :

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	Persentase (%)	60	68,63	114,4

Sumber: Dinas Perhubungan Prov kaltim 2020

Tabel diatas menjelaskan bahwa hasil dari pengukuran capaian sasaran strategis II memiliki realisasi 114,4% dimana hasil tersebut melebihi hasil dari target yang telah ditentukan dalam dokumen rencana strategis Tahun 2018-2023.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2019 dengan Tahun 2020 :

Dalam mengukur capaian realisasi Capaian Strategis maka diperlukan pembanding dengan capaian sebelum-sebelumnya, sehingga dapat terlihat adanya keberhasilan atau tidak berhasilnya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, adapun realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja dengan Tahun 2019 dan 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2020
			2019	2020	
1	2	3	4	5	$6 = ((5/4) - 1) * 100$
1.	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	%	50,49%	68,63%	35,93%

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2020

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil capaian sasaran 2 (Pertumbuhan kelaikan sarana prasarana lalu lintas jalan) jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya memiliki hasil peningkatan 35,93%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA/RPJMD :

Tabel 3.13
Realisasi Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2020)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100$
1.	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	%	85%	68,63%	78,21%

Sumber: Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2020

Pada Tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis 2 memiliki hasil capaian realisasi tingkat kemajuan sebesar 78,21% dari target 85%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja :

Sasaran Strategis 2 (Indikator : Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan)

• Analisis Keberhasilan / Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis 2

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Capaian Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat).

1. Hasil Inspeksi Keselamatan Kendaraan Bermotor / Rampcheck (Angkutan Orang dan Barang).

Tabel 3.14
Tabel Hasil Rampchek Kendaraan Bermotor Tahun 2020

Kendaraan yang Diperiksa	Tahun		
	Awal 2019	2020	Akhir RPJMD
Angkutan Umum	86	116	250
Angkutan Barang	379	379	400

Jumlah	465	495	650
Persentase		31,31%	

Sumber: Bidang LLAJ Dishub Kaltim Tahun 2020

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah kendaraan yang telah dilakukan rampchek (pemeriksaan kelaikan) berjumlah 116 kendaraan jenis angkutan umum. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 kegiatan rampcheck tidak dilakukan secara maksimal karena adanya Pandemi Covid-19. Diketahui hasil kendaraan yang telah di rampcheck pada Tahun 2020 berjumlah 116 kendaraan dan bila disandingkan dengan target akhir tahun (RPJMD) mendapat persentase sebesar 31.31%.

2. Jumlah Prasarana Keselamatan Jalan yang Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi

Salah satu indikator penunjang keberhasilan capaian sasaran strategis 2 adalah kegiatan pemasangan prasarana keselamatan jalan di ruas jalan provinsi, adapun jumlah prasarana keselaan jalan yang terpasang pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Jumlah Prasarana Yang Terpasang Pada Tahun 2019

Jenis Prasarana	Tahun			
	Awal 2019	2020	Jumlah Terpasang Data Awal + 2020	Akhir RPJMD (2023)
Rambu	3.155	1.333	4.488	16.000
Marka	20.6885	42.250	24.9135	2.237.725
Pagar	3.428	1.000	4.428	89.509
LPJU	0	10	10	235
Persentase	10.93%		14.71%	100%

Sumber: Bidang LLAJ Dishub Kaltim Tahun 2020

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa prasarana keselamatan jalan yang terpasang Pada Tahun 2020 untuk rambu berjumlah 1.333 unit, Marka jalan 42.250 m², pagar pengaman 1.000 m dan LPJU 10 unit. Sehingga jika disandingkan dengan target capaian hasil tahun terakhir RPJMD (Tahun 2023) mencapai 14.71%.

3. Prasarana Kelengkapan Terminal Tipe B (Indikator Penilaian WTN)

Kab/Kota berpredikat WTN (Wahana Tata Nugraha), merupakan indikator yang digunakan dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja sistem transportasi di wilayah Kab/Kota, salah satu penilaian WTN adalah penilaian terkait dengan prasarana kelengkapan pada Terminal Tipe B yang ada di Kalimantan Timur, adapun penilaiannya pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Angka Penilaian WTN pada Terminal Tipe B

PRASARANA TERMINAL	TAHUN
	2020
Batu Ampar	83
Sungai Kunjang	83
Lempake	83
Timbau	77
Penajam	62
Paser	58
Bontang	62
Sangatta	45
Berau	68
Persentase	69%

Sumber : Bidang LLAJ Dishub Prov. Kaltim 2020

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa angka penilaian Wahana Tata Nugraha khusus pada kelengkapan prasarana terminal memiliki capaian rata-rata 69 %.

4. Penurunan Jumlah Angka Kecelakaan

Tabel 3.17
Angka Kasus Kecelakaan

No	Kesatuan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Polresta Samarinda	226	133	120	225	170	109	96
2	Polres Balikpapan	225	143	140	179	132	88	47
3	Polres Bontang	39	40	38	76	92	55	56
4	Polres Kukar	211	146	145	296	152	40	77

5	Polres Kutim	52	91	90	59	50	34	23
6	Polres Kubar	25	33	30	55	48	103	22
7	Polres Berau	114	48	46	85	100	27	55
8	Polres Paser	89	59	56	149	80	71	41
9	Polres PPU	60	43	40	69	44	43	31
	JUMLAH	1.041	736	705	1.193	868	570	448

Sumber : Data Polda Kaltim 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada 3 (tiga) tahun terakhir, rata-rata angka kasus laka lintas di beberapa Kab/Kota mengalami penurunan kecuali di Kota Bontang, Kab. Kukar dan Kab. Berau.

• **Alternatif Solusi / Upaya Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan**

1. Mengkaji kembali jumlah kebutuhan sarana prasarana keselamatan jalan pada ruas jalan provinsi dan lokasi rawan kecelakaan sesuai dengan kebutuhan, guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
2. Meningkatkan kembali kegiatan inspeksi keselamatan angkutan umum dan angkutan barang secara rutin dan berjenjang, guna mengurangi tingkat pelanggaran over dimensi dan overloading dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten.
3. Peningkatan nilai capaian Wahana Tata Nugraha melalui :
 - a) Komitmen pimpinan untuk meningkatkan nilai capaian WTN;
 - b) mengkaji kembali kebutuhan sarana prasarana kelaikan transportasi darat.

5. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 2
(Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat)

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab	Ket
1	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	598	488	122,54 %	Kepala Bidang LLAJ	APBD
		Pengendalian Fasilitas Pengamanan lalu Lintas Jalan	Panjang Jalan yang dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	Km	120	120	100 %	Kasi Lalu Lintas Jalan	APBD
		Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan	Jumlah Badan Usaha Angkutan Umum yang dibina (Badan Usaha)	Badan Usaha	24	24	100%	Kasi Angkutan Jalan	APBD
		Pembinaan dan Pengendalian Keelamatan Sarana dan Prasarana Jalan	Persentase sarana angkutan darat yang laik uji dan prasarana yang laik fungsi	%	50	75,13	150,26 %	Kasi Keselamatan Sarana dan Prasarana	APBD

Sumber : Dinas Perhubungan Prov kaltim 2020

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk menunjang sasaran strategis 2 Dinas perhubungan memiliki 1 (satu) Program strategis yaitu sebagai berikut :

d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan :

1. Kegiatan Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan
2. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan Prasarana

Tabel 3.19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 2

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	118,2	44,13	74,07

Sumber: Olah data Dinas Perhubungan 2020

3.4. Capaian Tujuan Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2020

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2020
1.	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Jumlah Penumpang Yang Terlayani (Orang) dan Jumlah Barang (Ton)	11.026.150 Orang dan 344.850.000 Ton	3.570.750 Orang dan 294.478.397 Ton

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2019

Dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja tujuan pada RPJMD Tahun 2018-2023 di Tahun 2020 secara signifikan menurun khususnya jumlah penumpang dikarenakan Pandemi COVID-19.

Tabel 3.21
Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Perhubungan dan UPTD Terminal Tipe B

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Persentase	Total APBD		Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan		Total Program / Kegiatan		Ket.
				BL	BTL	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2019	Rp. 59.459.735.500	Rp. 23.707.137.724	53,98 %	Rp. 43.913.836.500	Rp. 15.545.899.000	8	18	8	18	APBD
2020	Rp. 38.431.915.643	Rp. 34.610.913.880	90,06%	Rp. 23.581.580.643	Rp 14.850.335.000	8	18	8	18	APBD

Sumber : Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2020

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Penggunaan Anggaran Tahun 2020 memiliki nilai penyerapan sebesar 90,06% sedangkan tahun 2019 penyerapan realisasi anggaran sebesar 53,98%.

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas ke pusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman	35	17	-46,11	Rp. 2.032.976.600	Rp. 1.936.346.265	95.24
2	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	50,49	68,63	118,2	Rp. 21.548.604.043	Rp. 19.923.453.939	92.45
Jumlah					Rp. 23.581.580.643	Rp. 21.859.800.204	92.69

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.481.042.328	6.006.416.282	92.6%	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.609.490.000	2.583.262.500	98.9%	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelmbagaan Pemerintah Daerah	1.894.725.000	1.835.361.366	96.8%	APBD
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	1.396.785.000	1.390.503.686	99.5%	APBD
5	Programn Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	6.896.662.050	5.958.194.000	86.3%	APBD
6	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	685.205.000	617.900.036	90.1%	APBD
7	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.257.771.600	1.228.638.629	97.6%	APBD
8	Pogram Pembangunan dan Pengembangan terminal Tipe B (UPTD Terminal)	90.000.000	89.807.600	99.7%	APBD
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTD Terminal)	1.417.023.165	1.323.324.305	93.3%	APBD
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (UPTD Terminal)	757.876.500	732.216.800	96.6%	APBD
11	Program Peningkatan Kapasitas Kelmbagaan Pemerintah Daerah (UPTD Terminal)	95.000.000	94.175.000	99.1%	APBD
Jumlah		23.581.580.643	21.859.800.204	92.6%	

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Prov Katim 2020

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 yang telah disusun dalam Dokumen LKjIP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Kedua (2020) memiliki hasil capaian sebagai berikut :

1. Pada sasaran strategis 1 (Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman) dengan indikator kinerja “Persentase Pergerakan Sarana Transportasi” memiliki target sebesar 35% dan memiliki realisasi capaian kerja 17% sehingga capaian kinerja pada sasaran tersebut mencapai 48,57%;
2. Pada sasaran strategis 2 (Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat) dengan indikator kinerja “Pertumbuhan Kelaikan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan” memiliki target sebesar 60% dan memiliki realisasi capaian kerja 68,63% sehingga capaian kinerja pada sasaran tersebut mencapai 114,4%;
3. Capaian Indikator Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah Jumlah Penumpang Yang Terlayani (Orang) dan Jumlah Barang (Ton) dan memiliki 3.570.750 Orang dan 294.478.397 Ton.

4.2 Saran

Dari Analisis Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun Anggaran Tahun 2020, diperlukan saran sebagai berikut :

1. Untuk menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel dan bermanfaat diperlukan komitmen pimpinan terhadap sinergitas antara rencana strategis dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dapat terukur dengan baik;
2. Perlu adanya evaluasi secara berjenjang terkait dengan capaian-capaian program dan kegiatan Dinas Perhubungan Prov Kaltim pada Tahun berjalan untuk menunjang capaian RPJMD baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan;
3. Untuk mendapatkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu adanya peningkatan kerjasama antara stakeholder yang terkait dalam mendapatkan data yang akan disusun pada dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.